

DAFTAR PUSTAKA

- BKD Kabupaten Tegal. 2018. Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2018.
- BKD Kabupaten Tegal. 2018. Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019.
- BKD Kabupaten Tegal. 2020. Profil Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2020.
- Bosar M. Pardede, *Ketidaktaatan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan dalam Penggunaan Formalin pada Produk Pangan*, Tesis Magister ISIPOL Pascasarjana FISIPOL UI 2009.
- BPKP. 2020. Laporan Kinerja Tahun 2019.
- BPS Kabupaten Tegal. 2020. Kabupaten Tegal dalam Angka 2020.
- BPS Kabupaten Tegal. 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020.
- BPS Kabupaten Tegal. 2021. Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2021.
- Buletin Kepegawaian BKN edisi XL, https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Buletin-Kepegawaian-XL_mini.pdf.
- Dahlen. 2016. Pengawasan Ombudsman RI Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1 No.1.
- Djarmika, Sastra dan Marsono. 1995. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Fahmi, Wirza dkk. 2017. Kedudukan PNS yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Fawaid, Achmad (penyadur). 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach (Third Edition)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firman, Iip Ilham, *Demografi Relasional (Relational Demography) dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (Kasus Kab. Kepulauan Anambas Prov. Kepri)*, Disertasi Program Doktorat Studi Inovasi Kebijakan dan Kepemimpinan Sekolah Pascasarjana UGM 2020.
- Guzlan, Odie Faiz. 2018. Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 1.
- Hadjon, Philipus M. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2018. Revitalisasi Manajemen ASN melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No.2.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2019. Tanggungjawab Pribadi dalam Kasus Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh PNS. *Jurnal Hukum Undang*, Vol. 2 No. 1.
- Harefa, Naomi Sari Kristiani dkk. 2020. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tipikor yang dilakukan oleh PNS: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN. *SiGN Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1.
- Haryo Bimo Bramantyo, *Maladministrasi Pertanahan dan Akibat Hukumnya atas Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hilmy Insana Purnaningtyas, *Penegakan Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Berstatus sebagai Terpidana Korupsi*, Tesis Magister Hukum Pascasarjana FH UGM 2019.
- Hisyam, Ciek J. dan Abdul Rahman H.. 2015. Sosiologi Perilaku Menyimpang. Jakarta: LPP Pres UNJ.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/6204/3/BAB%20%20II.pdf>
- <https://itjen.dephub.go.id/2016/11/10/level-3-target-untuk-tingkat-maturasi-spip/>, diakses pada 17 Februari 2022.
- <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Opini-WTP-Bukan-Jaminan-Tidak-Akan-Korupsi.pdf>, diakses pada 22 Desember 2021.
- <https://kasn.go.id/id/publikasi/7-alasan-ppk-belum-melakukan-ptdh-terhadap-asn-berstatus-terpidana-korupsi>, diakses pada 20 Januari 2022.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/13/20472451/2357-koruptor-berstatus-pns-ini-detail-berdasarkan-instansi-dan-daerah?page=all>, diakses pada 29 April 2021.
- <https://nasional.tempo.co/read/435514/anggota-dpr-kritik-pengangkatan-azirwan>, diakses pada 7 Januari 2022.
- <https://simpeg.tegalkab.go.id/v17/dashboard/epersonal>, diakses pada 25 November 2021.
- https://utama.tegalkab.go.id/page/view/sejarah_kabupaten_tegal_20190121082625, diakses pada 25 November 2021.
- <https://www.bkn.go.id/berita/bkn-blocking-layanan-kepegawaian-kepada-93-721-pns-yang-tidak-registrasi-pupns>.

<https://www.bkn.go.id/pengumuman/pemenang-bkn-award-2020>, diakses pada 22 Desember 2021.

https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/SIARAN-PERS-Nomor_-017_RILIS_BKN_V_2021-Jakarta-30-Mei-2021-Data-97.000-PNS-Yang-Tidak-Mengikuti-PUPNS-Tahun-2015-Telah-Diselesaikan-BKN.pdf, diakses pada 22 Desember 2021.

https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/07/SIARAN-PERS-Nomor_-021_RILIS_BKN_VII_2021-Jakarta-01-Juli-2021-BKN-Award-2021_-Apresiasi-atas-Komitmen-dan-Konsistensi-Pelaksanaan-Manajemen-ASN.pdf, diakses pada 22 Desember 2021.

<https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, diakses pada 22 Desember 2021.

<https://www.kasn.go.id/details/item/368-7-alasan-ppk-belum-melakukan-ptdh-terhadap-asn-berstatus-terpidana-korupsi>.

Irawati, Renny. 2012. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS yang Melakukan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Irmandani, Deva. 2018. Maladministrasi dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, diakses dari <http://repository.unair.ac.id/74555/>

Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.

Jiwantara, Firzhal Arzhi. 2019. Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian Negara dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34 No. 3.

Jonetje Wambrauw, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Dokter dalam Penulisan Resep Sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Umum R.A Kartini Jepara Tahun 2006*, Proposal Penelitian Tesis Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 2006.

Juliani, Henny. 2019. Akibat Hukum Penyalahgunaan wewenang administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 4.

Lazuardi, Ahmad Lintang (penyadur). 2015. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (Third Edition)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lestari, Chadijah Rizki dan Basri E. 2020. Tanggungjawab Pemerintah dalam Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PNS Terpidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018. *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 10 No. 2.

- M. Imam Bagus Asmara, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Tesis Magister Hukum Pascasarjana FH UGM 2016.
- Mahfudhoh, Siti dan Thinni Nurul Rohmah. 2015. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 3, No. 1.
- Mahmudi, *Pengaruh Independensi, Tanggung Jawab Hasil, dan Identitas Moral terhadap Reaktansi Bawahan atas Tekanan Atasan untuk Melakukan Manipulasi Akuntansi: Pengujian Teori Kepatuhan*, Disertasi Program Doktor FEB UGM 2018.
- Maria Magdalena, *Indikasi Kesewenang-wenangan Pimpinan dalam Melakukan Pemberhentian dari Jabatan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 06/G/2014/PTUN.MTR dan Putusan Nomor 08/G/2014/PTUN.ABN)*, Tesis Magister Hukum Pascasarjana FH UGM 2019.
- Miinudin dan Etry M. 2018. Penegakan sanksi administrasi terhadap ASN yang melakukan kejahatan jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemprov. Bengkulu. *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 3 No.1.
- Monti, Roy Marthen dan Irwan P. 2018. Penerapan Sanksi Disiplin Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kab.Gorontalo Utara. *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No. 1.
- Moureta Vitria Loreent, *Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alkes RSUD Kraton)*, Tesis Magister Hukum Pascasarjana FH Unisula 2018.
- Muchsan. 2000. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muvariz, Fitri Rahmadhani. 2019. Analisis Aspek Keadilan dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2.
- Nurdjannah, Taufiq (penyadur). 1983. *Introduction to Psychology*. Jakarta: Erlangga.
- Pratiwi, A. A Ayu Inten dan I Wayan B.S.L. 2019. Bentuk-bentuk Maladministrasi Pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara* Vol. 7 No. 2.
- Putra, T. A. P. S. (2017). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pendeteksian Fraud Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Intervening Pada

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Coopetition*, Vol. 8, No. 1.

Putri, R.I. 2018. Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Kota Bukittinggi. *JOM Fisip*, Vol 5, Edisi II.

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 01/K/TUN/2012, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11e993ab02710ac6bd3f303533303330/pdf/519831ae84f101204fe50186f9f55d71.

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg untuk PNS B, C, D dan E.

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg untuk PNS A.

Ranoto. 2020. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap PNS Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 2.

Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.

Rochani, Ahmad Hamam. 2005. Ki Gede Sebayu: Babad Negari Tegal. Semarang: Intermedia Paramadina bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Ronald Philips Letor, *Difusi Rezim Administrasi Publik Kontemporer dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Road Map Reformasi Birokrasi Prov. NTT)*, Tesis Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM 2020.

Rumapea, R.A. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS. *Jurnal Sasi*, Vol. 25 No. 2.

Rusnin. 2019. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai ASN (Tinjauan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN). *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 09 No. 02.

Ruspina, Depi Oktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 3.

Siaran Pers BKN, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/01/SIARAN-PERS-UPDATE-PNS-Tipikor-Inkracht-Aktif-Bekerja-di-Pemerintah-Daerah.pdf>.

Siaran Pers BKN, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Penuntasan-Capai-88-1.906-PNS-Tipikor-BHT-Terima-SK-PTDH.pdf>.

- Simanjuntak, E. 2018. Urgensi Harmonisasi Hukum di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Hukum Peratun, Vol. 1 No. 1*.
- Sudrajat, T. 2017. Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Civil Service, Vol. 11 No. 2*.
- Sudrajat, T. 2018. Perlindungan Hukum atas Biopatologi yang Berimplikasi Maladministrasi: Analisis Tindakan Penundaan Berlarut dalam Proses Perizinan. *Jurnal Civil Service, Vol. 12 No. 2*.
- Sufriadi. 2014. Tanggungjawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1*.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryatin, dkk. 2019. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Infrastruktur, Komitmen Pimpinan dan Keteladanan Pimpinan terhadap Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Pekbis Jurnal, Vol. 11 No. 1*.
- Susanto, E. 2009. Memahami Korupsi dari Perspektif Perilaku Organisasi: Mengapa Seseorang Terjebak dalam Perilaku Korupsi?. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 13 No. 1*.
- Syam, F., dkk. 2020. Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS di Peradilan Administrasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No.1*.
- Tambun, M.A. 2019. Dualisme Mengenai Pemberhentian PNS. *Jurnal De Lega Lata, Vol. 4 No.1*.
- Wibowo, Richo Andi. 2016. Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 1*.
- Widyatama, dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 No. 2*.
- Wiranti, dkk. 2020. Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol. 09, No. 03*.
- Wulantami, Ardina. 2018. Pilihan Rasional Keputusan Perempuan Sarjana Menjadi Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Dimensia, Vol. 7, No. 1*.
- Zamzami, Faiz dan Ihda Arifin Faiz. 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6 No. 1*.